

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROPORSI
DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Irwan Prasetyo¹, Bambang Agus Pramuka²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman
Jl. HR. Boenyamin No. 708, Purwokerto 531222, Jawa Tengah, Indonesia
*Email: irwanprasetyo36@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 10 perusahaan yang termasuk dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* selama 4 tahun periode pengamatan sehingga terdapat 40 observasi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Akan tetapi kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris, *Tax Avoidance*

ABSTRACT

This study aims to determine the included of institutional ownership, managerial ownership and the proportion of independent board of commissioner on tax avoidance. The method used in this research is quantitative method and the data used is secondary data. The sample used in this study there are 10 companies included in the Jakarta Islamic Index (JII) for 4 years observation period so that there are 40 observations. Sampling technique using purposive sampling method. The analysis method used is descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The results of this study show that simultaneously institutional ownership, managerial ownership and proportion of independent board of commissioner have a significant effect on tax avoidance. Partially institutional ownership and managerial ownership have a significant effect on tax avoidance However, the proportion of independent board of commissioners has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: Institutional Ownership, Managerial Ownership, Proportion of Board of Commissioners, *Tax Avoidanc*

1. PENDAHULUAN

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting dan terbesar yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih baik untuk dibagikan untuk pemegang sahan (*Shareholder*) maupun untuk diinvestasi kembali (Suandi, 2008:2). Adanya kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkesinambungan tentu bertolak belakang kepentingan dari perusahaan yang menginginkan agar pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2013:58).

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak menimbulkan upaya wajib pajak yang meminimalisasi beban pajak terutama dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai perpajakan (*Lawful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*Unlawful*). Upaya untuk meminimalisasi beban pajak tersebut dengan cara perencanaan pajak (*Tax Planing*).

Tax planing merupakan usaha untuk merekayasa beban pajak serendah mungkin (*tax affairs*) dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi masih ada didalam bingkai peraturan perusahaan (*Lawful*). Penghindaran pajak ini dapat dikatakan fenomena yang rumit dan unik karena disatu sisi undang-undang memperbolehkan perpajakan tetapi, disisi lain tidak diinginkan pembuat undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* juga tidak selalu diterapkan oleh perusahaan, karena tidak semua unsur atau fakta yang dikenal dalam perpajakan dapat dihindari wajib pajak (Dewi dan jati 2014:250).

Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Karayan dan swenson (2007) dalam Hanum (2013:3) mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelolah pajaknya yaitu dengan melihat tarif pajak efektifnya. Keberadaan nilai *effective tax rate* merupakan salah satu bentuk yang dihitung dalam sebuah perusahaan. Oleh karena, itu keberadaan dari sebuah *effective tax rate* menjadi suatu perhatian yang khusus bagi peneliti karena dapat merangkum efektif kumulatif dari berbagai semua insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng *et al*, 2007 dalam hanum, 2013:4).

Suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perusahaan dan tata cara perencanaan pajaknya dipengaruhi oleh karakteristik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dijalankan perusahaan itu sendiri (Friese *et al*, 2006 dalam anisa, 2012:123). *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam maharani dan suardana, 2014:426). *Corporate governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) dan berbagai kepentingan (*principle*) yang berkaitan dengan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan dalam tindakan pengambilan keputusan suatu perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013:58). Tata kelola perusahaan yang baik muncul karena adanya pemisahan antara manajer dan pemilik perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem* (Dewi dan Jati, 2014:251). Karakteristik *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen.

Kepemilikan instutusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta instutusi lainnya pada akhir tahun (Shien *et al*, 2006 dalam anindhita dikutip sekaredi 2011:24). Lim (2011) dalam Hanum (2013:36) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan Mahulae (2016), Endang (2016), Feranika (2015), Nur laily (2016), Cahyono dkk (2016), Khan dkk (2016), Salehi dkk (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, Annisa (2012), Hanum (2013), Putri dan Herawati (2014), Diantari dan Ulupui (2016), Khoirunnisa (2014), Putrantri dan Setiawanta (2015), Mahulae dkk (2016) dan Masripah dkk (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Arifani (2012) menegaskan bahwa struktur kepemilian saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang

dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Hasil penelitian yang dilakukan Mahulae (2016), Pramudito dan Sari (2015), Mark dan Thomas (2016), Annuar dkk (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, Pohan (2008) dalam Putri dan Herawati (2014), Kurniaty (2016), Budiarti (2017), Kim dkk (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Proporsi dewan komisaris independen merupakan ukuran dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2006 dalam Hanum, 2013:2005). Hasil penelitian yang dilakukan Mahulae (2016), Putrantri dan Setiawanta (2015), Nandasari (2015) dan Eksandy (2015) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Namun Annisa (2012), Hanum (2013), Murni dkk (2016), Diantari dan Ulupui (2016), Khoirunnisa (2014), Nur laily (2016) dan Cahyono dkk (2016) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah (*loopholes*) dari ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (Darussalam dan Septriadi, 2009 dalam Putri, Zaitul dan Herawati, 2014:4).

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen

corporate governance merupakan suatu sistem, proses dan struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara manajer, pemilik, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola dan mengendalikan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemajuan usaha yang transparan dan akuntabilitas perusahaan yang menekankan pada pentingnya pemenuhan tanggung jawab kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance* tentu akan berdampak baik pada kegiatan operasional perusahaan dan kinerja perusahaan semakin efektif dan efisien bagi para *stakeholders* termasuk dalam penentuan kebijakan perpajakannya. Berbagai pemahaman mengenai *corporate governance* berkembang berdasarkan pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (*agent*) melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999 dalam Hanum, 2013:13).

Penelitian yang dilakukan Mahulae (2016), Feranika (2015), Pramudito dan Sari (2015) dan Nandasari (2015) menyimpulkan bahwa secara simultan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: secara simultan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional

Husnan (2001) dalam Hanum (2013:28) menegaskan bahwa ada dua jenis kepemilikan dalam perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen. Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua kelompok pemegang saham, yaitu *controlling shareholders* dan *minority shareholders*. *Agency theory* ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*). Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Untuk itu, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan (*asymmetric information*). Sehingga konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).

Penelitian yang dilakukan Mahulae (2016), Endang (2016), Feranika (2015), Nur laily (2016), Cahyono dkk (2016), Khan dkk (2016), Salehi dkk (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Arifani (2012:4) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa atau opsi saham yang dimiliki direktur dan karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya. *Agency theory* menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahulae (2016), Pramudito dan Sari (2015), Mark dan Thomas (2016), Annuar dkk (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

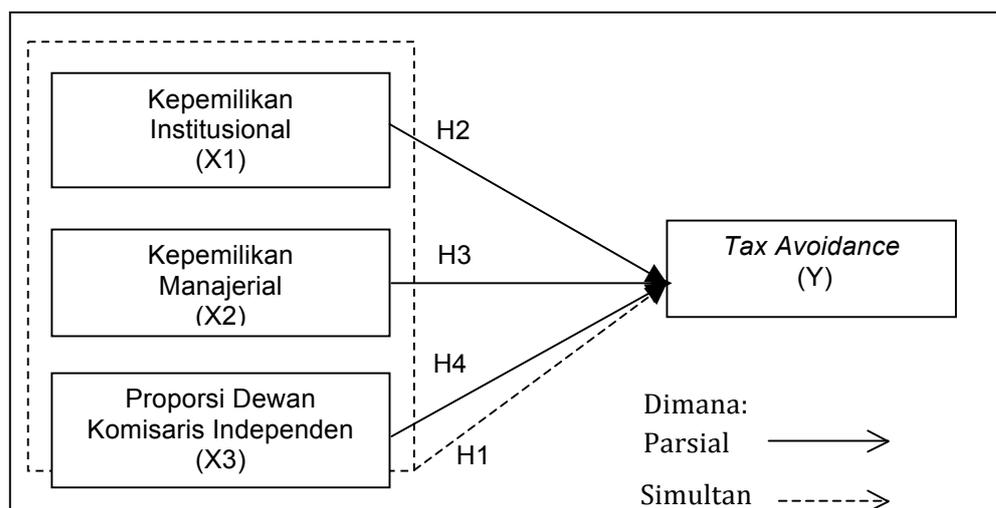
Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006) dalam Hanum (2013:25) dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder* dalam perusahaan.

Berbagai pemahaman mengenai *corporate governance* berkembang berdasarkan pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (*agent*) melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999 dalam Hanum, 2013:13).

Penelitian yang dilakukan Mahulae (2016), Putrantri dan Setiawanta (2015), Nandasari (2015) dan Eksandy (2015) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Peneliti

3. METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif dengan melakukan studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) khususnya perusahaan yang termasuk dalam kelompok *Jakarta Islamic Index (JII)* selama tahun 2011-2014. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014).

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini ada 51 perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* selama tahun 2011-2014. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang konsisten atau

yang masuk dalam kelompok *Jakarta Islamic Index* (JII) selama tahun 2011-2014 dan memenuhi kriteria tertentu.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif tertentu, dimana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sampel (Sugiyono, 2010 dalam Hanum, 2013:46).

Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2014 sebanyak 51 perusahaan.
- b. Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang selain rupiah sebanyak 1 perusahaan.
- c. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan audit dan laporan tahunan selama periode 2011-2014 tidak ada.
- d. Perusahaan yang tidak mempunyai nilai laba negatif tidak ada.
- e. Perusahaan yang mempunyai nilai *effective tax rate* lebih dari satu tidak ada. Dari total populasi sebanyak 51 perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII), hanya terdapat 10 perusahaan yang memenuhi kriteria.

Variabel – variabel Penelitian

variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen.

Tax Avoidance (Y). Variabel *tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate* (ETR) yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan (PPH Badan) dengan laba sebelum pajak (Hanum, 2013:41). Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Kepemilikan Institusional (X1). Kepemilikan institusional diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar (Djakman dan Machmud, 2013:43). Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial (X2). Variabel kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisaris dengan jumlah saham yang beredar (Arifani, 2012:8). Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham Manajemen}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

Proporsi Dewan Komisaris Independen (X3). Variabel dewan komisaris independen diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris (Arifani, 2012:9). Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data sekunder seperti laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data dari literatur seperti buku, artikel, jurnal maupun media cetak lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Sedangkan teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik komputerisasi yaitu menggunakan aplikasi SPSS 21. Teknik ini digunakan untuk mempermudah dalam proses pengolahan data sampai dengan pada analisis data dan uji hipotesis yang akan dilakukan pada model regresi penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang akan diolah sehingga dapat menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif menyajikan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dalam variabel-variabel penelitian ini (Ghozali, 2006 dalam Hanum, 2013:47).

Uji Asumsi Klasik

Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan melalui uji *Durbin-Watson* (DW test). Jika $4-dl < d < dl$ maka dalam model regresi terdapat masalah autokorelasi. Jika $du < d < 4-du$ maka model regresi bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006 dalam Ningsaptiti, 2010:48).

Uji multikolonieritas. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat multikolonieritas. Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance value* digunakan untuk mengukur variabilitas independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi *tolerance value* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Model regresi yang bebas multikolonieritas yaitu *tolerance value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ (Ghozali, 2006 dalam Hanum, 2013:49).

Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan nilai residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Selain itu, pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu meregresikan absolut nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen. Jika nilai probabilitas signifikansi variabelnya $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006 dalam Hanum, 2013:51).

Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang nilai residualnya terdistribusi secara normal. Terdapat dua cara untuk melakukan uji normalitas yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006 dalam Pamungkas, 2013:80). Analisis grafik dapat dilihat melalui grafik histogram dan *normal probability plot* yaitu membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Data dikatakan terdistribusi secara normal jika data atau titik-titik disekitar garis diagonal tersebar mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila *asymptotic significance* $> 0,05$ maka data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006 dalam Pamungkas, 2013:81).

Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Pamungkas, 2013:77). Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh antara karakteristik *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y = *Tax Avoidance* (ETR)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Kepemilikan Institusional (INST)

X_2 = Kepemilikan Manajerial (MANJ)

X_3 = Proporsi Dewan Komisaris Independen (INDP)

ϵ = *Error*

Uji Signifikan Simutan (Uji F). Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung hasil *run* regresi yang dilakukan. Jika nilai F-tabel $< F$ -hitung maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Apabila

nilai probabilitas signifikansi pada model penelitian $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2006 dalam Hanum, 2013:52).

Uji Signifikan Parsial (Uji t). Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-tabel dengan t-hitung. Jika t-tabel $<$ t-hitung maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dan apabila nilai probabilitas signifikansi *p-value* $< 0,05$ maka suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2006 dalam Hanum, 2013:53).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
ETR (Y)	40	9.23	31.95	22.5622	5.05565
INST (X1)	40	17.88	85.00	58.3997	17.53814
MANJ (X2)	40	.00	.02	.0005	.00316
INDP (X3)	40	33.33	80.00	46.1585	15.59923
<i>Valid N (listwise)</i>	40				

Sumber: Data yang diolah 2017

Dari uji statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari *tax avoidance* (ETR) adalah sebesar 22.5622 dan standar deviasi sebesar 5.05565. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya simpangan data variabel *tax avoidance* (ETR) selama periode pengamatan. Nilai rata-rata kepemilikan institusional (INST) sebesar 58.3997 dan standar deviasinya sebesar 17.53814. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya simpangan data variabel kepemilikan institusional (INST) selama periode pengamatan. Nilai rata-rata kepemilikan manajerial (MANJ) sebesar 0.0005 dan standar deviasinya sebesar 0.00316. Standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingginya simpangan data variabel kepemilikan manajerial (MANJ) selama periode pengamatan. Nilai rata-rata proporsi dewan komisaris independen (INDP) sebesar 46.1585 dan standar deviasinya sebesar 15.59923. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya simpangan data variabel proporsi dewan komisaris independen (INDP) selama periode pengamatan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Dari uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,472. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* dengan menggunakan tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$), jumlah variabel independen ($k=3$) dan jumlah data sampel ($n=40$). Diperoleh nilai $d_l=1,338$ dan $d_u=1,659$. Oleh karena nilai DW 2,472 sehingga nilai $4-d_l$ (2,662) dan $4-d_u$ (2,341), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Sehingga model regresi penelitian dapat diterima dan layak digunakan.

Tabel. 2 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	2.472

Sumber: Data yang diolah 2017

Uji Multikolonieritas

Dari uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Sehingga model regresi penelitian dapat diterima dan layak digunakan.

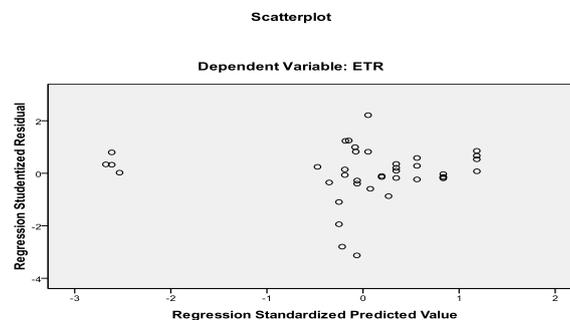
Tabel. 3 Hasil Uji Multikolonieritas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (<i>Constant</i>)		
INST	.994	1.006
MANJ	.979	1.021
INDP	.980	1.020

Sumber: Data yang diolah 2017

Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot*, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar diatas maupun dibawah nilai 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi penelitian dapat diterima dan layak digunakan

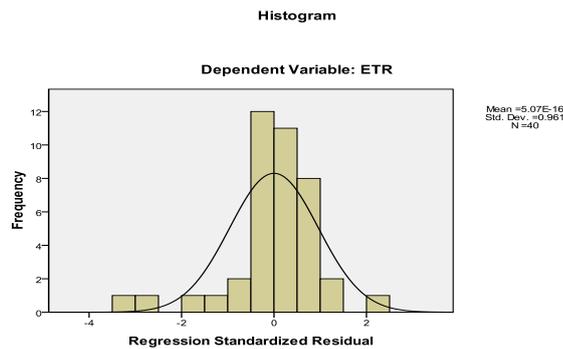


Gambar 2. Grafik *Scatterplot*

Uji Normalitas

Dari grafik histogram diatas, menunjukkan pola distribusi normal, dilihat dari data yang tersebar disekitar grafik histogram dan mengikuti arah grafik histogram. Sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*



Gambar 3. Gambar Grafik Histogram

Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F dan Uji t

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>		
1 (<i>Constant</i>)	15.604	3.208	4.864	.000
INST (X1)	.158	.039	4.054	.000
MANJ (X2)	71.849	218.390	.329	.744
INDP (X3)	-.050	.044	-1.141	.261

Sumber: Data yang diolah tahun 2017

$$Y = 15,604 + 0,158 \text{ INST} + 71,849 \text{ MANJ} - 0,050 \text{ INDP} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 15,604 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata *tax avoidance* perusahaan sebesar 15,604%. Koefisien regresi INST sebesar 0,158 menyatakan bahwa setiap penambahan kepemilikan institusional sebesar 1% akan meningkatkan *tax avoidance* perusahaan sebesar 0,158%. Koefisien regresi MANJ sebesar 71,849 menyatakan bahwa setiap penambahan kepemilikan manajerial sebesar 1% akan meningkatkan *tax avoidance* perusahaan sebesar 71,849%. Koefisien regresi INDP sebesar 0,050 menyatakan bahwa setiap penambahan kepemilikan manajerial sebesar 1% akan meningkatkan *tax avoidance* perusahaan sebesar 0,050%.

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa nilai F-hitung sebesar 6,242 dengan p-value sebesar $0,02 < 0,05$ dan nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel ($6,242 > 2,866$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel. 5 Hasil Uji F

	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	341.091	3	113.697	6.242	.002 ^a
Residual	655.735	36	18.215		
Total	996.826	39			

Sumber: Data yang diolah tahun 2017

Dari uji t variabel INST, menunjukkan bahwa nilai t-hitung (4,054) > t-tabel (1,685) dengan *p-value* (0,00) < (0,05). Maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari uji t variabel MANJ, menunjukkan bahwa nilai t-hitung (0,329) < t-tabel (1,685) dengan *p-value* (0,744) > (0,05). Maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari uji t variabel INDP, menunjukkan bahwa nilai t-hitung (-1,141) < t-tabel (1,685) dengan *p-value* (0,261) > (0,05). Maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil uji F diperoleh nilai F-hitung (6,242) > F-tabel (2,866) dengan *p-value* (0,02) < (0,05). Maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan sebuah perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance* tentu akan berdampak baik pada kegiatan operasional perusahaan dan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien bagi para *stakeholder* termasuk dalam penentuan kebijakan perpajakannya.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya, antara lain penelitian Sari dan Martani (2010) dalam Putri dan Herawati (2014) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik belum berdampak signifikan diperusahaan-perusahaan di Indonesia. Kemungkinan penyebab perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sudah mampu mengelola manajemen perpajakannya dengan baik, sehingga manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil uji t diperoleh nilai t-hitung (4,054) > t-tabel (2,023) dengan *p-value* (0,00) < (0,05). Maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dalam rangka mengurangi *agency problem* dan mencapai keuntungan *bottom line performance* yang lebih tinggi serta menjamin investasi berkelanjutan, maka beban pajak perusahaan harus diminimalisir melalui perencanaan pajak agresif yang didorong oleh para pemilik institusional.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya, antara lain penelitian Annisa (2012), Hanum (2013), Putri dan Herawati (2014:13), Diantari dan Ulupui (2016), Khoirunnisa (2014), Putrantri dan Setiawanta (2015), Mahulae dkk (2016) dan Masripah dkk (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemungkinan penyebab perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya perbedaan jenis sampel perusahaan dalam penelitian. Perusahaan dengan jenis sektor industri yang berbeda akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil uji t diperoleh nilai t-hitung (0,329) > t-tabel (2,023) dengan *p-value* (0,744) > (0,05). Maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya, antara lain Pohan (2008) dalam Putri dan Herawati (2014), Kurniaty (2016), Budiarti (2017), Kim dkk (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemungkinan penyebab perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya perbedaan jenis sampel perusahaan dalam penelitian. Perusahaan dengan jenis sektor industri yang berbeda akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil uji t diperoleh nilai t-hitung (-1,141) < t-tabel (2,023) dengan *p-value* (0,261) > (0,05). Maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga dewan komisaris independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan *stakeholder*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, antara lain penelitian Annisa (2012), Hanum (2013) Annisa (2012), Hanum (2013), Murni dkk (2016), Diantari dan Ulupui (2016), Khoirunnisa (2014), Nur laily (2016) dan Cahyono dkk (2016) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan JII selama tahun 2011-2014. (2) Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan JII selama tahun 2011-2014, Akan tetapi kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan JII selama tahun 2011-2014.

Saran

Beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yaitu: (1) Menambahkan variabel umur perusahaan sebagai variabel kontrol, sehingga dapat mengetahui pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dari setiap umur perusahaan. (2) Menambahkan variabel karakteristik *corporate governance* dalam variabel independen, sehingga variasi variabel dependen dapat dijelaskan seluruh atau sebagian lebih oleh variabel independen. (3)

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan satu atau dua tahun pengamatan, sehingga jumlah sampel perusahaan dapat mewakili seluruh atau sebagian lebih anggota dari suatu jenis kelompok perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. (2012). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* : 123-136.
- Annur, Haerul. A, dkk. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Journal of Accounting Studies*, 164 (2014) : 150-160.
- Arifani, R. (2012). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Universitas Brawijaya Malang* : 1-17.
- Budiarti, Sukmah. SD, (2017). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi* : 1-12.
- Cahyono, Deddy Dyas, Andini Rita dan Raharjo Kharis. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*SIZE*), *Leverage* (*DER*) dan Profitabilitas (*ROA*) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* BEI Periode Tahun 2011-2013. *Jurnal Akuntansi*, 2 (2) : 1-10.
- Dewi, Ni Nyoman Kristina dan Jati, I Ketut. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI). *E-Jurnal Akuntansi Udayana* . : 249-260
- Diantari, Putu Rista dan Ulupui IGK Agung. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (1) : 702-732.
- Eksandy, Arry. (2015). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1) : 1-20.
- Feranika, Ayu. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Jurnal Akuntansi* :31-39.
- Hanum, H. R. (2013). Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate* (*ETR*). *Jurnal Akuntansi* : 1-54.
- Khan, M, dkk (2016). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *Journal of Accounting* : 1-54.
- Khoirunnisa. (2014). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* : 1-29.
- Kim, J, dkk. (2016). Managerial Ownership and Tax Planning: Evidence from Stock Ownership Plans. *Journal of Accounting* : 1-41.
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. ratna. (2013). Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18 (1): 58-66.

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROPORSI DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

- Kurniaty. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Struktur Kepemilikan terhadap *Aggressive Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi* : 1-20.
- Maharani, I. Gusti Ayu Cahya dan Suardana, Ketut Alit. (2014). Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (2) : 525-539.
- Mahulae, Endang Endari, Pratomo Budi dan Nurbaiti Annisa. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 -2014). *Jurnal Manajemen*, 3 (2) : 1626-1633.
- Mark, Shuai dan Thomas, Wayne. B (2016). Legal Environment and Corporate Tax Avoidance: Evidence from State Tax Codes. *Journal of Accounting* : 1-57.
- Masripah, dkk. (2016). Controlling *Shareholder and Tax Avoidance: Family Ownership and Corporate Governance*. *Journal of Business Studies*, 8 (3) : 1-14
- Murni, Yetty, dkk. (2016). The Role of Institutional Ownerships, Board of Independent Commissioner and Leverage: Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *Journal of Business and Managemen*, 18 (11) : 79-85.
- Nur laily. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Return On Asset* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi* : 1-17.
- Sekaredi, S. (2011). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Tahun 2005- 2009). *Jurnal Akuntansi* : 1-50.
- Salehi, Karam. A, dkk (2016). The Impact of Institutional Ownership on The Relationship between Tax and Capital Structure. *Journal of Advances in Mathematical Finance & Applications*, 1(2) : 57-67.
- Suandy, Early. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif)*. Cetakan ke 18. Bandung: CV Alfabeta.
- Putranti, Anissa Setiawati dan Setiawanta Yulita. (2014). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi* : 1-14.
- Putrantri, Annisa. S. dan Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi* : 1-14.
- Putri, P. A., Zaitul, dan Herawati. (2014). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi* : 1-15.
- Pramudito, Batara Wiryo dan Sari, Maria M. Ratna. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntans Universitas Udayana*, 13 (3) : 705-722.
- www.idx.co.id.